



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1679 / DATIN /2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah;- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memahami peraturan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas- Mengetahui tugas dan fungsi pokja pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Komputer, Alat Tulis Kantor (ATK) dan Telepon
PERINGATAN <p>Apabila pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur maka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik tidak akan tercapai.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Bidang/Tim	Bidang Datin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan dan memberi arahan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas				Peraturan terkait	1 Hari	Disposisi pelaksanaan RB dan pembangunan ZI	
2.	- Membuat Nota Dinas permintaan usulan Tim dari setiap bidang - Membentuk Tim RB dan ZI				Disposisi pelaksanaan RB dan pembangunan ZI	3 Hari	SP Tim Pelaksaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas	
4.	Melakukan sosialisasi mengenai Pelaksanaan Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan peraturan yang berlaku				SP Tim Pelaksaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas	180 menit	Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas	
5.	Menyusun rencana kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas				Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas	2 Hari	Draft rencana kerja	
6.	Melakukan analisa dan rekomendasi renja				Draft rencana kerja	2 Hari	Rekomendasi Renja	
7.	Persetujuan renja				Rekomendasi Renja	1 Hari	Dokumen Renja	
8.	Melakukan pengumpulan kelengkapan dokumen / evidence sesuai dengan renja				Dokumen Renja	12 Bulan	Evidence RB dan ZI	
9.	- Evaluasi evidence , jika ada kekurangan/ perbaikan maka dikembalikan ke masing-masing Pokja - Perbaiki evidence				Evidence RB dan ZI	12 Bulan	Evidence RB dan ZI	
10.	Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas				Evidence RB dan ZI	1 Hari	Laporan pelaksanaan RB dan pembangunan ZI	
10.	Pelaporan pemenuhan evidence ke TPI				Laporan pelaksanaan RB dan pembangunan ZI	1 Hari	Hasil evaluasi oleh TPI	
11.	Evaluasi oleh TPN				Hasil evaluasi oleh TPI	1 Hari	Hasil evaluasi oleh TPN	